

PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROPINSI DKI JAKARTA: BELANJA MODAL SEBAGAI PEMEDIASI

IMAN AKHADI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jl. Kyai Tapa No. 20, Grogol, Jakarta Barat, Indonesia
iman.akh@gmail.com

Abstract: The objective of this research is to analyze the effect of Capital Expenditures in mediating the relationship between Regional Original Revenue and Profit Sharing Funds (Government Grant) for economic growth in DKI Jakarta Province which is measured based on the value of Gross Regional Domestic Product (GRDP) based on constant 2010 prices. Secondary data on variables comes from data on the realization of the DKI Jakarta Provincial Budget between 2013-2017. This research is a quantitative study using multiple regression analysis methods. The results of the study show that simultaneously, Local Original Income and Profit Sharing Funds have a significant effect on economic growth. Partially, only Regional Original Income has a positive effect on economic growth, whereas the Revenue Sharing Fund does not affect the economic growth of DKI Jakarta Province. The results of subsequent research indicate that Capital Expenditures do not mediate the relationship between Regional Original Revenue and Profit Sharing Funds to the economic growth of DKI Jakarta Province.

Keywords: Capital expenditure, economic growth, tax revenue, grant

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal dalam memediasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi DKI Jakarta yang diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan 2010. Data sekunder atas variabel-variabel tersebut berasal dari data realisasi APBD Propinsi DKI Jakarta antara tahun 2013-2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisa regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, hanya Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak memediasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta.

Kata kunci: Belanja modal, pertumbuhan ekonomi, pajak, dana bagi hasil

PENDAHULUAN

DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan barometer pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai kota industri dan perdagangan, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui

pembangunan sarana dan prasarana, baik transportasi, layanan kesehatan, pendidikan dll. Hal ini dapat dibuktikan pada akhir tahun 2017, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai 6,22 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2016 sebesar 5,88 persen. (Kompas, 6 Pebruari 2018).

Peristiwa Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017, telah mengalihkan perhatian sebagian besar masyarakat pada masalah politik. Berita tentang perekonomian kurang menjadi perhatian publik, mengingat sedang terjadi transisi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta. Walaupun perhatian masyarakat dan media massa lebih dominan memberitakan masalah politik, pencapaian pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2017 ternyata berada jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.07 persen. Hal ini tentunya sangat membanggakan terutama bagi Gubernur terpilih Anies Baswedan yang baru dilantik pada bulan Oktober 2017.

Propinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom, sesuai dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengelola keuangan daerahnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), Dana Perimbangan dan Hibah.

Sumber-sumber penerimaan daerah berupa PAD dan Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus serta Dana Bagi Hasil diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP pada tingkat nasional dan kenaikan PDRB dalam lingkup regional yang digunakan sebagai ukuran atas perkembangan suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian (Zuwety Eka Putri, Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol 5 No 2, 2015).

Meskipun telah terjadi pelimpahan kewenangan kepada daerah otonom, pemerintah pusat tetap berkewajiban untuk melakukan kontrol atas pertumbuhan dan kesejahteraan daerah yang secara agregat

berpengaruh kepada perekonomian nasional. Pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara setiap tahun memberikan dana bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus ataupun Dana Bagi Hasil.

Dana bantuan/grant pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi hubungan antara dana bantuan Pemerintah Pusat dengan Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika Pemerintah Daerah bijak dalam pengelolaan dananya untuk kepentingan pembangunan ekonomi sebagai pemicu meningkatnya perekonomian daerah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan belanja langsung serta mengurangi belanja tidak langsung lainnya yang tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Namun faktanya, dana APBD di daerah sebagian besar digunakan untuk biaya belanja pegawai. Seperti dinyatakan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, pada tahun 2016 sebesar 70,9% dari total APBD di propinsi digunakan untuk belanja pegawai dan mengalami peningkatan setiap tahunnya (Okezone, 1 Desember 2017).

Oleh karena itu, tidak dapat diragukan lagi bahwa pembangunan sarana infrastruktur memegang peranan sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, menurunkan biaya distribusi serta yang paling penting dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Melalui program peningkatan belanja modal, secara langsung akan berdampak pada peningkatan pembangunan infrastruktur seperti sarana transportasi, perumahan, pertanian dan infrastruktur lain yang langsung berdampak pada peningkatan produktifitas dan

kesejahteraan rakyat.

Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya diharapkan dapat mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi, 1997). Oleh karenanya alokasi anggaran pembangunan yang terencana dan lebih berpihak kepada publik diharapkan akan menjadi perantara terciptanya hubungan antara semangat pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sebagai pembiayaan belanja publik dengan harapan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Penelitian dengan memposisikan belanja modal sebagai variabel mediasi antara lain dilakukan oleh Walidi (2009) yang menyimpulkan bahwa belanja modal positif memediasi hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pendapatan per kapita. Muis (2011) melaporkan bahwa belanja modal dapat secara positif memediasi hubungan antara DAU dan DAK dengan pertumbuhan ekonomi. Temuan yang berbeda diungkapkan oleh Uhise (2013) yang menemukan bahwa belanja modal negatif memediasi hubungan antara DAU dengan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan serupa dengan Uhise juga diungkapkan oleh Afriani et al.(2012) bahwa belanja modal tidak memediasi hubungan antara PAD dan DAU dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Amnah (2014) menyimpulkan bahwa belanja modal memediasi hubungan antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi tetapi tetap sejalan dengan Afriani (2012) dan Uhise (2013) dalam menyimpulkan bahwa hubungan antara DAU dan DAK dengan pertumbuhan ekonomi tidak dimediasi oleh belanja modal.

Dari beberapa hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa sifat mediasi belanja modal dalam hubungan antara pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil positif dan negatif. Selain itu

pada penelitian terdahulu belum mengikutsertakan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dalam model empiris penelitiannya. Meskipun nilai DBH jauh lebih kecil dari DAU akan tetapi besarnya hampir dua kali lipat nilai DAK.

Perbedaan nilai PAD dan dana perimbangan antar daerah memiliki dampak yang berbeda pula pada pertumbuhan ekonominya. Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu melalui capaian nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Saat ini, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kemampuan sumber daya ekonomi terbesar di Indonesia. Dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 2.410 triliun pada tahun 2017, DKI Jakarta menyumbang sekitar 17 persen dari total perekonomian nasional. Secara nominal, perkembangan nilai PDRB DKI Jakarta selama tahun 2013 hingga 2017 cukup cepat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12 persen per tahun atau sekitar 210 trilion rupiah. Pertumbuhan ini lebih cepat dari pertumbuhan inflasi Jakarta yang rata-rata sekitar 5,2 persen per tahun selama periode yang sama. Secara nominal, pada tahun 2013 nilai PDRB DKI Jakarta atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp 1.546,88 triliun dan pada tahun 2017 nilainya menjadi Rp 2.410,37 triliun. (BPS Propinsi DKI, 2018)

Berdasarkan data PDRB provinsi seluruh Indonesia untuk tahun 2013-2017 diketahui bahwa PDRB tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta. Posisi teratas nilai PDRB yang dicapai oleh DKI Jakarta sangatlah wajar mengingat kedudukan DKI Jakarta juga sebagai ibu kota negara. Hal inilah yang melandasi pemilihan Propinsi DKI Jakarta sebagai objek penelitian oleh penulis karena Propinsi DKI Jakarta merupakan barometer perekonomian nasional.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai proses naiknya perekonomian atau peningkatan kapasitas produksi dalam suatu

negera yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dijadikan sebagai salah indikator keberhasilan perekonomian. Pada level nasional, perkembangan ekonomi akan dipengaruhi oleh perekonomian global, baik secara langsung melalui transaksi perdagangan dan investasi, maupun secara tidak langsung sebagai akibat dari peristiwa ekonomi yang memiliki pengaruh global. Demikian pula halnya pada level regional (provinsi/kabupaten/kota). Hanya saja pada level regional tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh luar negeri, tetapi juga oleh kondisi perekonomian nasional secara umum.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan PDRB. PDRB dapat dikatakan sebagai salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah karena dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah pada satu periode waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai barang yang tercipta di suatu wilayah pada satu kurun waktu tertentu. Selain itu, PDRB juga dapat mengukur peran institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang tercipta tersebut. (BPS Propinsi DKI, 2018). Angka PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Propinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa sumber PAD diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah. Menurut

Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 2 menyebutkan bahwa jenis pajak daerah meliputi 5 jenis pajak propinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/Kota.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat melalui alokasi pendapatan APBN kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004 dan PP No.55 Tahun 2005). Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah (Pasal 3 ayat(2) UU No. 33 Tahun 2004). Dana perimbangan terdiri dari tiga jenis yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari pajak dan bukan pajak/sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak berasal dari Pajak Bumi dan Banguna sektor P3 (Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan) dan Pajak Penghasilan Pasal 25, PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 21 yang berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 23). Khusus wilayah Propinsi DKI Jakarta, dana

perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat hanya berasal dari Dana Bagi Hasil. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, pemerintah Propinsi DKI Jakarta tidak memperoleh dari pemerintah pusat (beritajakarta, 1/9/2016).

Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah pengertian belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah asset tetap atau investasi yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jenis-jenis belanja modal terdiri 5 jenis, yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya.

Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi yang dimiliki suatu daerah umumnya dalam bentuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah. Setiap daerah memiliki potensi kekayaan sumber daya yang berbeda. PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut lebih mandiri dan tidak tergantung dari dana bantuan dari Pemerintah Pusat. Sehingga daerah tersebut lebih leluasa dan fleksibel dalam mengelola APBD dalam membiayai pembangunan daerah yang selanjutnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui peningkatan aktivitas ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan jumlah output barang dan jasa yang dihasilkan dari masyarakat. Selanjutnya hal tersebut akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Penelitian oleh Brata (2004) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan PAD sesuai dengan agenda

pembangunan ekonominya. Akan tetapi hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya. Sebagaimana diketahui, belakangan ini banyak pihak, khususnya dunia usaha, yang mengeluhkan soal begitu banyaknya pajak dan/atau retribusi yang justru menekan daya saing daerah. Kesimpulan serupa juga diungkapkan oleh Gunantara dan Dwirandra (2014). Keduanya menyimpulkan bahwa dengan meningkatnya PAD, daerah menjadi lebih mampu dalam memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat lokal. Selanjutnya ketersediaan infrastruktur publik tersebut akan menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi yang beriringan dengan meningkatnya produktivitas. Berdasarkan uraian diatas serta hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah H_1 PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh DBH terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3, DBH Pajak Penghasilan yang berasal dari penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 serta DBH Cukai Hasil Tembakau.

Penelitian yang dilakukan Taaha et al.(2009) menemukan hubungan positif dan signifikan antara DBH dengan pertumbuhan ekonomi. Alokasi DBH sebagai sumber pembiayaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana ekonomi akan menunjang kegiatan produksi barang dan jasa oleh investor baik dari masyarakat setempat ataupun dari luar daerah yang bersangkutan. Dengan munculnya kegiatan investasi selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja, dan menciptakan multiple effect sehingga

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pujati (2008) dan Santosa (2013). Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah

H₂ DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal diantaranya dilakukan oleh Ardhani (2011) dalam Wandira (2013) yang menyebutkan bahwa semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya. Hal serupa diungkapkan oleh Brata (2004) bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Penelitian oleh Kusnandar dan Siswantoro (2011) menyimpulkan bahwa PAD sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal bahkan pada tingkat keyakinan 99% ($\alpha=1\%$). Walaupun persentase PAD cukup kecil dari total pendapatan yang diterima oleh daerah (sekitar 7%) namun sangat berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Dengan meningkatnya PAD daerah lebih leluasa dalam merencanakan dan mengalokasikan kegiatan atau pengeluaran berdampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah

H₃ PAD berpengaruh positif terhadap terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengaruh DBH terhadap Belanja Modal

Wandira (2013) menyebutkan bahwa DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari PAD, DAU dan DAK. Penelitian oleh

Wandira (2013) menyimpulkan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Hasil ini menjelaskan bahwa daerah dengan realisasi DBH yang besar cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. Sehingga jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat. Kesimpulan serupa lainnya disampaikan oleh Indra (2010) dan Maryadi (2012). Berdasarkan uraian diatas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah

H₄ DBH berpengaruh positif terhadap terhadap pengalokasian belanja modal.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut model Rostow dan Musgrave (Mangkoesebroto, 1997 dalam Hendarmin, 2012) dijelaskan bahwa model belanja modal pemerintah pada tahap awal perkembangan ekonomi dicirikan dengan besarnya persentase investasi pemerintah terhadap total investasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Lebih lanjut, Wagner menyebutkan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Mangkoesebroto, 1997 dalam Hendarmin, 2012). Sehingga secara tidak langsung ataupun langsung dalam hal dikehendaki PDB secara agregat atau pendapatan perkapita meningkat harus diikuti dengan meningkatnya nilai pengeluaran pemerintah. Dengan semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan (Adi 2006).

Penelitian oleh Sodik (2007) menyimpulkan adanya pengaruh positif yang signifikan pengeluaran pemerintah baik

pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin terhadap pertumbuhan ekonomi regional dikarenakan pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Hal ini bersesuaian dengan tahapan perkembangan ekonomi sebagaimana diungkapkan oleh Rostow dan Musgrave. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah belanja modal yang dapat mempengaruhi naik/turunnya PDRB adalah belanja pembangunan infrastruktur yang dapat menyentuh langsung pada perekonomian masyarakat. Berdasarkan uraian di atas penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah

H₅ Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Peran Mediasi Belanja Modal dalam Hubungan antara PAD dan DBH dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi regional menjadi salah satu agenda penting setelah otonomi daerah. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah daerah yaitu melalui optimalisasi pendapatan daerah. Akan tetapi kenaikan pendapatan daerah tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti anggaran belanja yang efektif dan efisien dalam bentuk kegiatan-kegiatan produktif yang mengarahkan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Brata (2004) menyimpulkan bahwa PAD serta sumbangan dan bantuan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara DBH dan sisa dana anggaran tahun lalu tidak berpengaruh signifikan. Penelitian lainnya oleh Maryati dan Endrawati (2010) menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontradiktif dengan temuan Brata yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan, Santosa (2013) menyimpulkan bahwa DAK dan DBH

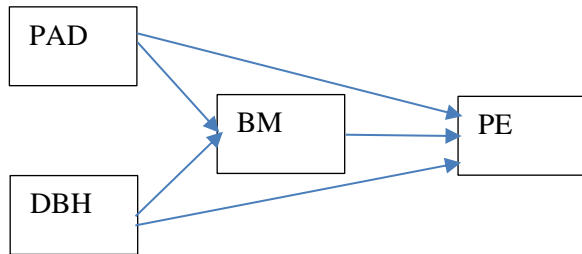
berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian dengan model empiris sedikit berbeda yaitu dengan menyertakan belanja modal sebagai variabel independen bersama dengan variabel pendapatan daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain dilakukan oleh Setiyawati dan Hamzah (2007) yang menyimpulkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara DAK dan belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Prasetya (2011) menyimpulkan pula bahwa PAD, DAU, DBH dan belanja modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara DAK berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dengan model empiris yaitu belanja modal sebagai variabel dependen antara lain oleh Wandira (2013) menyimpulkan bahwa PAD, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sementara DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal. Penelitian lainnya oleh Maryadi (2012) menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian di atas dan penelitian terdahulu, diketahui bahwa belanja modal mampu bersama-sama dengan variabel pendapatan daerah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi akan tetapi disaat yang bersamaan belanja modal juga dipengaruhi oleh variabel pendapatan daerah. Sehingga dapat diduga variabel belanja modal memiliki sifat sebagai variabel mediasi/intervening. Hal ini mengarahkan peneliti pada pengembangan hipotesis berupa

H_{6a} Belanja Modal memediasi hubungan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

H_{6b} Belanja Modal memediasi hubungan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hipotesa yang telah dirumuskan, maka secara umum model

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Model regresi pada penelitian ini meliputi:

$$PE = \alpha_1 + \beta_1 PAD + \beta_1 DBH + \beta_1 BM + \epsilon \text{ (Model Mediasi)} \quad (1)$$

$$PE = \alpha_2 + \beta_2 PAD + \beta_2 DBH + \epsilon \text{ (Model Langsung)} \quad (2)$$

$$BM = \alpha_3 + \beta_3 PAD + \beta_3 DBH + \epsilon \text{ (Model Langsung)} \quad (3)$$

$$PE = \alpha_4 + \beta_4 BM + \epsilon \text{ (Model Langsung)} \quad (4)$$

Analisis variabel mediasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode perbedaan koefisien yang menggunakan metode pemeriksaan dengan melakukan analisis dengan dan tanpa melibatkan variabel mediasi. Metode perbedaan koefisien dilakukan dengan cara melakukan dua kali analisis, yaitu analisis dengan melibatkan variabel mediasi dan analisis tanpa melibatkan variabel mediasi.

Metode pemeriksaan variabel mediasi dengan pendekatan perbedaan koefisien dilakukan sebagai berikut: (1) memeriksa pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen pada model dengan melibatkan variabel mediasi (2) memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada model tanpa melibatkan variabel mediasi, (3) memeriksa pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi, (4) memeriksa pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen.

Jika (3) dan (4) signifikan, serta (1) tidak signifikan, maka belanja modal merupakan variabel mediasi sempurna (complete mediation). Jika (3) dan (4) signifikan serta (1) juga signifikan, di mana koefisien dari (1) lebih kecil (turun) dari (2) maka belanja modal dikatakan sebagai variabel mediasi sebagian (partial mediation). Jika (3) dan (4) signifikan serta (1) juga signifikan, di mana koefisien dari (1) hampir sama dengan (2) maka belanja modal dikatakan bukan sebagai variabel mediasi. Jika salah satu (3) atau (4) atau keduanya tidak signifikan maka belanja modal bukan sebagai variabel mediasi (Solimun, 2011; Hair et al., 2010).

HASIL PENELITIAN

Hasil uji statistik deskriptif terhadap PDRB atas dasar harga konstan 2010 Propinsi DKI Jakarta selama tahun 2013-2017 menunjukkan angka PDRB tertinggi dicapai pada tahun 2017 sebesar 1.635.855,75 atau naik sebesar 6,22% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 1.540.078,20 (Dalam Milyar Rupiah). Pencapaian pertumbuhan ini paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya tumbuh dibawah 6%.

Tabel 1 PDRB dan pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta 2013-2017 (Milyar Rupiah)

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010	Pertumbuhan ekonomi
2013	1.296.694,57	-
2014	1.373.389,13	5,91%
2015	1.454.563,85	5,91%
2016	1.540.078,20	5,88%
2017	1.635.855,75	6,22%

Sumber: BPS Propinsi DKI Jakarta

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DKI Jakarta selama tahun 2013-2017 selalu menunjukkan trend positif dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 19,01% dicapai pada tahun 2017, naik dari Rp 36,88 Trilyun tahun 2016

menjadi Rp 43,9 Trilyun pada tahun 2017. Pertumbuhan PAD terendah terjadi pada tahun 2015 yang hanya mengalami kenaikan sebesar 7,71% atau naik dari Rp 31,27 Trilyun pada 2014 menjadi Rp 33,68 Trilyun pada tahun 2015.

Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan PAD Propinsi DKI Jakarta 2013-2017 (Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan PAD
2013	26.852.192.667.634	-
2014	31.274.215.885.720	16,47%
2015	33.686.176.815.708	7,71%
2016	36.888.017.456.050	9,50%
2017	43.901.488.830.303	19,01%

Sumber: APDB DKI Jakarta

Pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) tertinggi dicapai pada tahun 2017 sebesar Rp16,84 Trilyun atau tumbuh sebesar 35,99% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp12,38 Trilyun. Akan tetapi pencapaian pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mengalami kenaikan sebesar 110,43% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp5,88 Trilyun. Sebaliknya pencapaian pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yang mengalami penurunan penerimaan DBH sebesar -38,62% atau turun dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp9,59 Trilyun.

Pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) tertinggi dicapai pada tahun 2017 sebesar Rp 16,84 Trilyun atau tumbuh sebesar 35,99% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp 12,38 Trilyun. Akan tetapi pencapaian pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mengalami kenaikan sebesar 110,43% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 5,88 Trilyun. Sebaliknya pencapaian pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yang mengalami penurunan penerimaan DBH sebesar -38,62% atau turun dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp9,59Trilyun.

Tabel 3 Dana Bagi Hasil (DBH) dan pertumbuhan DBH Propinsi DKI Jakarta 2013-2017

Tahun	Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Rupiah	Pertumbuhan DBH
2013	9.088.356.793.672	-
2014	9.591.547.940.000	5,54%
2015	5.887.267.644.697	-38,62%
2016	12.388.582.918.516	110,43%
2017	16.847.489.413.016	35,99%

Sumber : APDB DKI Jakarta

Berkaitan dengan Belanja Modal (BM) yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta selama tahun 2013-2017, terdapat kecenderungan mengalami penurunan selama tahun 2013-2016, akan tetapi pada tahun 2017 mengalami kenaikan Belanja Modal sebesar 23,20% (naik menjadi Rp11,045 Trilyun dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp8,96Trilyun). Belanja Modal tahun 2016 merupakan yang terendah selama tahun 2013-2017, dengan penurunan sebesar 12,48% dibandingkan dengan Belanja Modal tahun 2015 yang mencapai Rp10,244 Trilyun.

Tabel 4 Belanja Modal (BM) dan pertumbuhan BM Propinsi DKI Jakarta 2013-2017

Tahun	Belanja Modal (BM) dalam Rupiah	Pertumbuhan BM
2013	10.696.012.210.993	-
2014	10.411.118.358.122	-2,66%
2015	10.244.016.700.000	-1,61%
2016	8.965.470.002.128	-12,48%
2017	11.045.723.216.885	23,20%

Sumber: APDB DKI Jakarta

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas terhadap nilai residual model regresi untuk mengetahui apakah distribusi nilai residual tersebut mengikuti atau mendekati distribusi normal, yaitu distribusi data dengan bentuk lonceng (bell shaped) (Singgih 2002). Data yang diteliti merupakan data time series selama 5 tahun (2013-2017) yang diuji dengan menggunakan uji Jarque Bera (JB).

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap nilai Skewness dan Kurtosis untuk model I diperoleh nilai JB sebesar 2,445269 sementara nilai Chi Square dengan $df = 3-1 = 2$ dan $\alpha = 0,05$ didapatkan angka 5,991465. Hasil perhitungan nilai JB untuk model II diperoleh angka 2,998814 sementara nilai Chi Square dengan $df = 3 - 1 = 2$ dan $\alpha = 0,05$ didapatkan angka 5,991465. Hasil perhitungan JB untuk Model III diperoleh angka 2,197068 sementara nilai Chi Square dengan $df = 2 - 1 = 1$ dan $\alpha = 0,05$ didapatkan angka 3,841459. Untuk Model IV, hasil perhitungan JB diperoleh angka 2,343141 sementara nilai Chi Square dengan $df = 4 - 1 = 3$ dan $\alpha = 0,05$ didapatkan angka 7,814728. Berdasarkan hasil perhitungan JB untuk model I sampai IV diperoleh nilai dibawah nilai Chi Square masing-masing model, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi terdistribusi normal.

Selanjutnya setelah melakukan uji normalitas adalah melakukan uji heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi I sampai IV terbebas dari masalah asumsi klasik. Model I menguji pengaruh variabel independen (PAD dan DBH) tanpa melibatkan variabel mediasi (BM) terhadap variabel independen (PDRB). Hasil dari uji statistik Model I dengan menggunakan aplikasi SPSS 25 sebagai berikut.

Tabel 5 Model Regresi I

Model I	Koefisien	t
PAD	0,022	6,635
DBH	-0,003	-0,571
Konstanta	727690,934	8,611
F	44,254 sig. 0,022	
R	0,989	
R Square	0,978	
Adj. R Square	0,956	

Nilai R untuk Model I menunjukkan angka sebesar 0,989 yang berarti bahwa terdapat hubungan/pengaruh yang sangat kuat antara variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil) terhadap variabel

dependen (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB). Sementara Nilai R Square menunjukkan angka 0,978 atau 97,8% yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap variabel dependen sangat kuat. Nilai F hitung menunjukkan angka 44,2 lebih tinggi dari F tabel ($p = 0,01$; $f1=2$; $df2=2$) sebesar 0,010, yang berarti bahwa variabel PAD dan DBH secara bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap variabel PDRD.

Berdasarkan persamaan regresi dapat dijelaskan bahwa variabel independen PAD memberikan pengaruh positif terhadap variabel PDRD, yang artinya apabila terjadi peningkatan PAD maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan PDRD. Variabel independen PAD secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen PDRD, hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung (6,635) > t-tabel (2,919). Sebaliknya untuk variabel DBH memberikan pengaruh yang berlawanan dengan variabel PAD terhadap PDRD. Meskipun kontribusi DBH terhadap pendapatan daerah cukup besar (rata-rata 20% sampai 25%), akan tetapi jumlah DBH yang tidak konsisten setiap tahunnya kemungkinan menjadi penyebab variabel DBH tidak berpengaruh positif terhadap PDRD. Hal ini dapat dilihat pada penurunan DBH pada tahun 2015 (5,88 Trilyun) turun sebesar 38,62% dibandingkan dengan tahun 2014 (9,59 Trilyun). Berdasarkan nilai t-hitung sebesar -0,571 yang berarti nilai t-hitung terletak diantara -t-tabel dan +t-tabel (+/-2,9199), menunjukkan bahwa variabel independen DBH secara individu tidak berpengaruh terhadap PDRD.

Tabel 6 Model Regresi II

Model II	Koefisien	t
PAD	-0,027	-0,197
DBH	0,06	0,282
Konstanta	10555834,27	3,200
F	0,040	
R	0,197	
R Square	0,039	
Adj. R Square	-0,922	

Nilai R untuk Model II menunjukkan angka sebesar 0,197 yang berarti bahwa terdapat hubungan/pengaruh yang lemah antara variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil) terhadap variabel dependen (Belanja Modal/BM). Sementara Nilai R Square menunjukkan angka 0,039 yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap variabel dependen sangat lemah hanya 3,9%. Nilai F hitung menunjukkan angka 0,040 lebih tinggi dari F tabel ($\rho = 0,01$; $f1=2$; $df2=2$) sebesar 0,010, yang berarti bahwa variabel PAD dan DBH secara bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal/BM.

PAD memberikan pengaruh negatif terhadap variabel BM, yang artinya apabila terjadi peningkatan PAD maka akan menyebabkan terjadinya penurunan pada BM. Variabel independen PAD secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen BM, hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung (-0,197) terletak diantara -t-tabel dan +t-tabel (+/- 2,9199). Sebaliknya untuk variabel independen DBH memberikan pengaruh positif terhadap variabel dependen BM, yang berarti apabila terjadi peningkatan DBH maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan BM. Seperti halnya variabel PAD, variabel independen DBH secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen BM, hal ini terlihat dari nilai t-hitung (0,282) terletak diantara -t-tabel dan +t-tabel (+/- 2,9199), yang menunjukkan bahwa variabel independen DBH secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel BM. Hal ini dapat dijelaskan karena besarnya dana Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta selama periode 2013-2017 memiliki kecenderungan mengalami penurunan atau tidak stabil. Selama periode 2013-2016, jumlah belanja modal cenderung turun dari rata-rata Rp10Trilyun dari tahun 2013-2015 menjadi Rp8,9Trilyun pada tahun 2016. Walaupun pada tahun 2017 anggaran belanja modal naik lagi menjadi Rp 11

Trilyun. Ketidakstabilan dalam kebijakan anggaran belanja modal ini berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah PAD dan DBH yang diperoleh selama periode 2013-2017.

Tabel 7 Model Regresi III

Model III	Koefisien	t
BM	-0,020	-0,205
Konstanta	16636885,982	1,668
F	0,042	
R	0,117	
R Square	0,014	
Adj. R Square	-0,315	

Nilai R untuk Model III menunjukkan angka sebesar 0,117 yang berarti bahwa terdapat hubungan/pengaruh yang lemah antara variabel mediasi (Belanja Modal) terhadap variabel dependen (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB). Sementara Nilai R Square menunjukkan angka 0,042 yang berarti bahwa variabel mediasi memberikan kontribusi terhadap variabel dependen sangat lemah hanya 4,2%. Berdasarkan persamaan regresi dapat dijelaskan bahwa variabel independen BM memberikan pengaruh negatif terhadap variabel dependen PDRD, yang artinya apabila terjadi peningkatan BM maka akan menyebabkan terjadinya penurunan pada PDRD. Variabel mediasi BM secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen PDRD, hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung (-0,205) terletak diantara -t-tabel dan +t-tabel (+/- 6,3137), yang menunjukkan bahwa variabel mediasi BM secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel PDRD. Hal ini dapat dijelaskan bahwa belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta selama periode 2013-2016 memiliki trend menurun dari rata-rata pengeluaran BM sebesar Rp10Trilyun turun menjadi Rp8,9Trilyun pada tahun 2016. Baru pada tahun 2017 pengeluaran BM naik menjadi Rp11Trilyun. Hal ini berbanding terbalik dengan kecenderungan PDRB yang selalu mengalami kenaikan rata-rata diatas 5% pertahun, bahkan pada tahun 2017 tumbuh sebesar 6,22%.

Tabel 8 Model Regresi IV

Model IV	Koefisien	t
PAD	0,022	9,400
DBH	-0,002	-0,482
BM	-0,023	-1,924
Konstanta	967658,100	7,097
F	70,599	
R	0,998	
R Square	0,995	
Adj. R Square	0,981	

Nilai R untuk Model IV menunjukkan angka sebesar 0,998 yang berarti bahwa terdapat hubungan/pengaruh yang sangat kuat antara variabel independen (Pendapatan Asli Daerah/PAD, Dana Bagi Hasil/DBH dan Belanja Modal/BM) terhadap variabel dependen (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB). Sementara Nilai R Square menunjukkan angka 0,995 atau 99,5% yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap variabel dependen sangat kuat. Nilai F hitung menunjukkan angka 70,599 lebih tinggi dari F tabel ($\rho = 0,01$; $f1=3$; $df2=1$) sebesar 0,029, yang berarti bahwa variabel PAD, DBH dan BM secara bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap variabel PDRD.

PAD memberikan pengaruh positif terhadap PDRD, yang artinya apabila terjadi peningkatan PAD maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan PDRD. PAD secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen PDRD, hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung (9,400) > t-tabel (2,3533). Sebaliknya untuk variabel DBH memberikan pengaruh yang berlawanan dengan variabel PAD terhadap PDRD. Artinya peningkatan variabel independen DBH akan menyebabkan pada penurunan pada variabel dependen PDRD. Berdasarkan nilai t-hitung sebesar -0,482 yang berarti nilai t-hitung terletak diantara -t-tabel dan +t-tabel (+/-2,3533), menunjukkan bahwa variabel independen DBH secara individu tidak berpengaruh terhadap PDRD. Demikian juga dengan variabel independen BM sebagai variabel mediasi, berdasarkan persamaan model IV menunjukkan arah negatif

terhadap PDRD, yang berarti apabila terjadi peningkatan BM maka akan menyebabkan penurunan pada pertumbuhan PDRD. BM secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen PDRD, hal ini dapat dilihat dari t-hitung sebesar -1,924 terletak diantara -t-tabel dan +t-tabel (+/- 2,3533).

Berdasarkan uraian model II (menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi) dan III (menguji variabel mediasi terhadap variabel dependen), terlihat bahwa kedua model tersebut tidak signifikan atau dapat dikatakan terdapat hubungan yang lemah antara variabel independen dengan variabel mediasi, serta antara variabel mediasi dengan variabel dependen. Belanja Modal (BM) bukan merupakan variabel mediasi antara PAD dan DBH terhadap variabel PDRB. Kesimpulan ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Walidi (2009), Muis (2011), dan Afriani et al.(2012). Adapun penelitian dengan kesimpulan yang serupa dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Uhise (2013) dan Amnah (2014).

Pada penelitian ini, Belanja Modal tidak menjadi variabel mediasi hubungan antara pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dikarenakan proporsi Belanja Modal sejak tahun 2013 cenderung mengalami penurunan dari sisi nominal maupun prosentase terhadap total pengeluaran/belanja daerah. Pada tahun 2013-2014, jumlah Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI sebesar 28% dari total belanja daerah. Pada tahun 2015 seiring dengan naiknya pendapatan daerah dan belanja daerah, jumlah Belanja Modal tidak mengalami perubahan secara nominal, sehingga proporsi Belanja Modal terhadap belanja daerah turun menjadi 24%. Pada tahun 2016 jumlah Belanja Modal secara nominal turun menjadi Rp8,9Trilyun dari tahun 2015 sebesar Rp10,2Trilyun, sehingga secara prosentase jumlah Belanja Modal hanya sebesar 19% dibanding dengan total belanja daerah. Pada tahun 2017 jumlah Belanja Modal yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi DKI naik

menjadi Rp11 Trilyun atau mengalami kenaikan menjadi 21,6% terhadap total belanja daerah dibandingkan dengan tahun 2016.

Meskipun secara proporsional total Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta cukup tinggi (rata-rata 24% dibanding total belanja modal) selama 2013-2017, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian ini Belanja Modal tidak mampu menjadi faktor penggerak pertumbuhan ekonomi yang optimal di Propinsi DKI Jakarta. Salah satu penyebabnya karena ketidakkonsistenan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan anggaran, terutama dalam menetapkan jumlah anggaran Belanja Modal yang mengalami penurunan pada saat jumlah realisasi pendapatan dan jumlah total belanja daerah mengalami kenaikan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Propinsi DKI Jakarta selama periode 2013-2017 secara simultan/bersama-sama dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Akan tetapi secara individu, hanya PAD yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel PAD memberikan arah positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya DBH memberikan arah yang berlawanan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi DKI Jakarta membuktikan bahwa Propinsi DKI Jakarta telah mampu membiayai pembangunan di wilayahnya dengan mengandalkan pendapatan yang bersumber dari pengelolaan potensi ekonomi di wilayahnya berupa Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah). Pembangunan daerah Propinsi DKI Jakarta tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat (Dana Bagi

Hasil), akan tetapi sebagian besar bersumber dari pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta pengelolaan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan tujuan dari otonomi daerah yaitu dengan dilakukannya desentralisasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hasil penelitian selanjutnya adalah Belanja Modal diketahui tidak memediasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Besarnya Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta selama periode 2013-2017 yang cenderung turun secara nominal maupun secara proporsional terhadap total belanja daerah menyebabkan faktor Belanja Modal tidak mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Kebijakan Belanja Modal yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yang seharusnya dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tidak terjadi karena kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta yang cenderung justru menurunkan anggaran Belanja Modal pada saat realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah mengalami kenaikan. Penurunan anggaran Belanja Modal paling besar terjadi pada tahun 2016 sebesar 12,48% dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal tahun 2015 (Turun dari 10,24 Trilyun menjadi 8,9 Trilyun).

Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder berupa time series selama 2013-2017 di wilayah Propinsi DKI Jakarta, sehingga hasil penelitian ini hanya mewakili periode anggaran tahun 2013-2017. Sehingga apabila dilakukan penelitian dengan periode yang lebih panjang, ada kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan rentang waktu yang lebih panjang agar dapat menggeneralisasi hasil penelitian serta memberikan kesimpulan yang lebih komprehensif.

REFERENCES:

- Amnah. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi DKI Jakarta, 2018. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha 2013-2017. Katalog BPS 9302021.31
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*. Politeknik Negeri Pontianak.
- Kusnandar dan Dodik Siswanto. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Universitas Indonesia.
- Muis, Noni Hilwa. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.
- Pujiati, Amin. 2006. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putri, Zuwesty Eka, 2015. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol 5 No 2, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*.
- Setiyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Setiawan, Sakina Rahma Diah, 2018. Kompas News 6 Pebruari 2018. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/06/175140426/tahun-2017-pertumbuhan-ekonomi-dki-jakarta-622-persen>
- Sodik, Jamzani. 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Data Panel di Indonesia). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Solimun. Analisis Variabel Moderasi dan Mediasi. Program Studi Statistikan FMIPA UB. Universitas Brawijaya.
- Uhise, Stepvani. 2013. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*.
- Uly, Yohana Artha, 2017. OkezoneFinance News 1 Desember 2017 <https://economy.okezone.com/read/2017/12/01/20/1823863/sri-mulyani-geleng-geleng-70-apbd-habis-hanya-untuk-bayar-gaji-pns>
- Walidi. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Wandira, Gugus Arbie. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*.